

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan (X1) dan lingkungan politik (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y), karena variabel kinerja keuangan nilai tingkat signifikan ($0,00 < 0,05$) dan $T_{hitung} (4,108) > T_{tabel} (1,670)$. Sedangkan variabel lingkungan politik nilai tingkat signifikan ($0,00 < 0,05$) dan $T_{hitung} (3,756) > T_{tabel} (1,670)$.
2. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel independen (kinerja keuangan (X1) dan lingkungan politik (X2)) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah (Y), karena nilai sig. ($0,000 \leq \alpha (0,05)$) dan $F_{hitung} (24,903) > F_{tabel} (1,670)$.
3. Berdasarkan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah (Y) dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan (X1) dan lingkungan politik (X2) sebesar 43,4%, sedangkan sisanya 56,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata, berkaitan dengan kinerja keuangan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah maka disarankan agar dalam mengerjakan program-program yang telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada agar tercapai tujuannya dan kemudian dapat diungkapkan informasi keuangannya sesuai dengan realita yang ada dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Peneliti juga menyarankan agar pengelola keuangan melakukan konsultasi keuangan secara rutin dengan Inspektorat selaku audit interen pemerintah daerah agar dapat meminimalisir kesalahan dan kecurangan dalam hal pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata, berkaitan dengan lingkungan politik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah maka disarankan pemda Kabupaten Lembata dapat mempertegas kembali aturan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya peraktek KKN yang sangat berpengaruh besar terhadap pengungkapan informasi keuangan. Yang kedua, peneliti juga

menyarankan agar perlu ditingkatkan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, karena dalam penelitian ini hanya mengambil variabel kinerja keuangan dan lingkungan politik sebagai variabel independen. Diduga terdapat variabel-variabel lain yang dapat dihipotesiskan sebagai variabel independen maupun ditambah variabel moderisasi yang dapat memengaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeirma. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan, Opini Audit dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Skpd Kabupaten Gowa). *Skripsi Sarjana*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Hasan, M Iqbal Ir. 2001. *Pokok-pokok Materi Statistika 2 (Statistik Inferensif)*, Edisi Kedua.
- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Keempat*. Salemba Empat : Jakarta
- Budianto, W. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 30 Mei 2016
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022
- Fitriasari, Khairurizka, dan Martani. 2013. Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007. *Prosiding PESAT*, Volume 5 Oktober 2013, ISSN: 1858-2559.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Tentang *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1): 53-64.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pranataningrum, R. A. 2012. Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2008-2010. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 2, 138–150.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah